

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan bangsa dan negara. Tujuan utama pemerintah adalah memberikan layanan kepada masyarakat dan meningkatkan layanan ini di masa depan. Peningkatan layanan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dapat dilihat pada pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi regional dipengaruhi oleh faktor berikut, seperti investasi, inflasi, pemberdayaan PAD, tingkat pertumbuhan populasi, kontribusi angkatan kerja, dan lain-lain.

Peran pemerintah daerah dalam manajemen keuangan sangat ditentukan oleh keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penilaian pendapatan daerah dan anggaran belanja sangat penting untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun berikutnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah harus mengoperasikan roda pemerintahan yang efektif dan efisien untuk mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan, sehingga mereka dapat mengembangkan semua potensi masing-masing daerah. Tingginya tuntutan akan kinerja dan akuntabilitas di daerah-daerah ini telah menyebabkan perlunya

mengukur kinerja pemerintah daerah. Untuk alasan ini, pemerintah daerah harus mampu membangun jumlah kinerja yang baik.

Menurut Mahmudi (2010:2) Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas kinerja keuangan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan. Ada dua alasan utama perlunya pemerintah daerah untuk mempublikasikan laporan keuangan: laporan keuangan internal, salah satu alat untuk mengendalikan dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan, serta unit kinerja di dalamnya (Unit Kerja Daerah). Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban internal, yaitu pertanggungjawaban Kepala Keuangan kepada Presiden Daerah, Kepala Daerah Pejabat Pemerintah Daerah, dan DPRD. Dalam hal penggunaan eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal, yaitu pertanggungjawaban presiden daerah kepada masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers dan pihak lain yang memiliki kepentingan dalam laporan sebagai dasar keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan memiliki peran memberikan informasi yang relevan dengan pusat keuangan dan transaksi selama periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah juga berfungsi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, sehingga laporan harus disiapkan dengan cara yang sederhana sehingga pembaca laporan dapat dengan mudah memahaminya. Meskipun laporan keuangan bertujuan umum, maknanya telah menjadi umum dan sesederhana

mungkin untuk memenuhi kebutuhan semua pihak, tetapi tidak semua pembaca laporan dapat memahami laporan dengan baik.

Oleh karena itu, analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) diharapkan menjadi alat tolak ukur untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai kontributor terbesar bagi upaya pengembangan daerah. Dengan berdasarkan pada ringkasan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka penulis mengambil judul : “ **Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015-2017** “.

1.2 Batasan penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan data dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015-2017. Mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang dipandang sebagai hasilnya. Perhitungan rasio independensi, tingkat desentralisasi keuangan, rasio efisiensi, rasio efisiensi dan harmoni dalam berbelanja.

1.3 Rumusan masalah

- a. Bagaimana kinerja keuangan daerah Kabupaten Lumajang jika dilihat dari Rasio Independensi?
- b. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal?
- c. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang jika dilihat dari Rasio Efektifitas?

- d. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang jika dilihat dari Rasio Efisiensi?
- e. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang jika dilihat dari Rasio Keserasian Belanja Daerah?

1.3 Tujuan penelitian

- a. Untuk melihat Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang jika dilihat dari Rasio Kemandirian?
- b. Untuk melihat Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal?
- c. Untuk melihat Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang jika dilihat dari Rasio Efektifitas?
- d. Untuk melihat Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang jika dilihat dari Rasio Efisiensi?
- e. Untuk melihat Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang jika dilihat dari Rasio Keserasian Belanja Daerah?

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai Laporan Pertanggungjawaban APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Lumajang.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan menjadi acuan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Akuntansi Sektor Publik.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat membantu buku untuk menyelesaikan tugas akhir mereka dan memberikan pengetahuan tentang bagaimana menghitung analisis data keuangan dalam anggaran pendapatan dan pengeluaran daerah, sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana kinerja pemerintah daerah Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun.